

PERKEMBANGAN PERMUKIMAN KUMUH LIAR (STUDI KASUS DUKUH KALISARI DESA BANYUDONO KEC. BANYUDONO KAB. BOYOLALI)

Aida Nur Azqiya*, Mohammad Gamal Rindarjono, Rita Noviani

Program Studi Pendidikan Geografi, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

*E-mail: aidaaazq1@student.uns.ac.id

Diterima: 02/01/2024

Direvisi: 05/03/2024

Dipublikasikan: 18/04/2024

ABSTRACT

The problem of slum organizations begins with various interrelated variables, including education level, population density level, building density level, income and poverty level. Illegal slum settlements are defined as organizations that experience a decline in housing function with illegal land ownership status or not land with Ownership Rights Status. This research aims to (1) Analyze the development of slum organizations of liars in Kalisari Hamlet, Banyudono Village, Banyudono District, Boyolali Regency in 2012, 2017 and 2022; (2) Find out the level of slum organization of liars in Kalisari Hamlet, Banyudono Village, Banyudono District, Boyolali Regency; and (3) Analyze the incidence of fraudulent slum organizations in Kalisari Hamlet, Banyudono Village, Banyudono District, Boyolali Regency. The research method used in this research is the case study method. In this research, the development of illegal slum organizations is analyzed through the development of the number of house occupants and the number of house rooms whose changes are analyzed in 2012-2017 and 2017-2022. The level of slums is determined using the 3x3x3 method, then from the level of slums the appropriate treatment can be identified based on the main problems in the slum organization area. Dukuh Kalisari developed into a fraudulent slum organization due mainly to errors in government policy, the legality of the land occupied by residents, and the condition of the organization located along the river.

Keywords: squatter; slums; settlement.

ABSTRAK

Permasalahan permukiman kumuh diawali adanya berbagai variable yang saling berkaitan diantaranya yaitu tingkat pendidikan, tingkat kepadatan penduduk, tingkat kepadatan bangunan, pendapatan dan tingkat kemiskinan. Permukiman kumuh liar diartikan sebagai permukiman yang mengalami penurunan fungsi hunian dengan status kepemilikan lahan illegal atau bukan merupakan tanah dengan Status Hak Milik. Penelitian ini bertujuan (1) Menganalisis perkembangan permukiman kumuh liar di Dukuh Kalisari, Desa Banyudono, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali tahun 2012, 2017 dan 2022; (2) Mengetahui tingkat kekumuhan permukiman kumuh liar di Dukuh Kalisari, Desa Banyudono, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali; dan (3) Menganalisis penanganan permukiman kumuh liar di Dukuh Kalisari, Desa Banyudono, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan metode studi kasus. Dalam penelitian ini, perkembangan permukiman kumuh liar dianalisis melalui perkembangan jumlah penghuni rumah dan jumlah ruangan rumah yang dianalisis perubahannya pada tahun 2012-2017 dan 2017-2022. Tingkat kekumuhan diketahui dengan metode 3x3x3 yang selanjutnya dari tingkat kekumuhan dapat diketahui penanganan yang sesuai berdasarkan permasalahan utama pada area permukiman kumuh. Dukuh Kalisari berkembang menjadi permukiman kumuh liar akibat utamanya yaitu kesalahan kebijakan pemerintah, legalitas lahan yang ditempati penduduk, serta kondisi permukiman yang terdapat pada sempadan sungai.

Keywords: squatter; slums; settlement.

A. PENDAHULUAN

Kawasan permukiman kumuh merupakan sebuah kawasan hunian dengan penurunan fungsi hunian yang dicirikan dengan adanya lahan yang tidak sesuai dengan peruntukan/tata ruang, kepadatan bangunan sangat tinggi dalam luasan yang terbatas, memiliki kerawanan akan penyakit sosial maupun lingkungan, memiliki kualitas bangunan yang buruk, tidak terlayani prasarana lingkungan dengan baik dan dapat membahayakan keberlangsungan kehidupan dan penghidupan penghuninya (Crysta, 2017). Permasalahan permukiman kumuh diawali adanya berbagai variabel yang saling berkaitan diantaranya yaitu tingkat pendidikan, tingkat kepadatan penduduk, tingkat kepadatan bangunan, pendapatan dan tingkat kemiskinan (Putri et al., 2023). Tata sosial yang terkandung didalam masyarakat permukiman kumuh secara ekonomi pada umumnya yaitu golongan masyarakat miskin, cluster ini seringkali menjadi penyebab masalah sosial lainnya seperti degradasi kedisiplinan dan ketertiban dalam berbagai tatanan sosial (Fitri, 2021).

Berdasarkan SK Kumuh Kab. Boyolali yang diatur dalam SK Bupati Boyolali Nomor 662.1/324 Tahun 2017, Dukuh Kalisari atau biasa dikenal dengan kampung pengamen termasuk sebagai lokasi permukiman kumuh dengan status legalitas yaitu illegal dengan luas wilayah kumuh yaitu 0,4 ha. Selain Dukuh Kalisari terdapat wilayah lain di Kabupaten Boyolali yang dikategorikan sebagai permukiman kumuh. Berikut merupakan data permukiman kumuh Kabupaten Boyolali:

Tabel 1. Kawasan Kumuh Kab. Boyolali

No	Nama Kawasan/Kecamatan	Wilayah Administratif	Luasan (ha)
1	Banaran/Boyolali	RT.3/RW.5	2,09
		RT.5/RW.5	
2	Karanggeneng/Boyolali	RT.1/RW.9	0,51
		RT.2/RW.9	
3	Doplang/Teras	RT.1/RW.3	3,49
		RT.2/RW.3	
		RT.4/RW.1	
4	Teras/Teras	RT.5/RW.1	4,81
		RT.6/RW.1	
		RT.4/RW.4	
5	Tegalrejo/Sawit	RT.5/RW.4	4,66
		RT.6/RW.4	
6	Jatirejo/Sawit	RT.9/RW.2	1,49
7	Karangduren/Sawit	RT.7/RW.3	1,62
8	Kuwiran/Banyudono	RT.16/RW.5	2,38

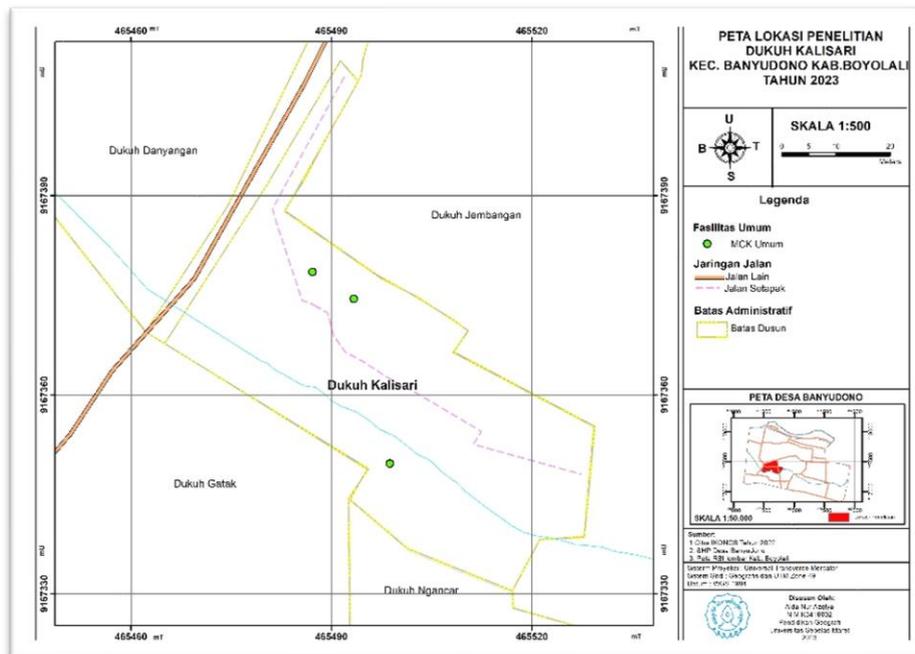
No	Nama Kawasan/Kecamatan	Wilayah Administratif	Luasan (ha)
9	Banyudono/Banyudono	RT.1/RW.2	4,3
		RT.2/RW.3	
		RT.4/RW.2 (Dk. Kalisari)	
10	Ngesrep/Ngemplak	RT.2/RW.1	4,18
		RT.4/RW.1	
11	Gagaksipat/Ngemplak	RT,3/RW.8	5,27
		RT.4/RW.8	
12	Donohudan/Ngemplak	RT.6/RW.7	4,92
		RT.7/RW.7	
13	Sawahan/Ngemplak	RT.6/RW.7	3,77
		RT.7/RW.7	
14	Girioto/Ngemplak	RT.4/RW.6	6,4
		RT.5/RW.6	

Sumber: Pengolahan Data DPKP, 2017

Dari beberapa lokasi yang ditetapkan sebagai permukiman kumuh, Dukuh Kalisari merupakan satu-satunya permukiman kumuh yang terjadi pada satu wilayah administratif. Permukiman kumuh yang terjadi dalam suatu wilayah administratif menjadi fenomena khusus yang perlu diketahui faktor-faktor penyebab kekumuhan di dalam dukuh tersebut. Oleh karena itu penulis memilih Dukuh Kalisari sebagai wilayah penelitian karena keseluruhan wilayahnya ditetapkan dalam SK Bupati Boyolali Nomor 662.1/324 Tahun 2017 sebagai kawasan permukiman kumuh dengan status illegal atau dapat disebut permukiman kumuh liar. Fenomena permukiman kumuh di Kabupaten Boyolali tersebar di beberapa kecamatan seperti yang tercantum pada tabel 1.1. Penetapan permukiman kumuh tersebut telah di atur dalam SK Bupati Boyolali Nomor 662.1/324 Tahun 2017. Perkembangan permukiman di wilayah illegal dapat menjadi indikasi perkembangan kondisi sosial, ekonomi, dan geografis yang bersifat negatif sehingga perlu diketahui apakah jumlah perkembangan tersebut dari tahun ke tahun terus meningkat, apabila terindikasi peningkatan maka perlu dilakukan Upaya preventif agar tidak menjadi permasalahan yang menahun (Maulana, 2018). Keberadaan permukiman kumuh liar di wilayah penggunaan lahan sempadan sungai, dengan sebagian besar penduduk yang merupakan pengamen menjadi fenomena yang harus segera diselesaikan karena menjadi permasalahan yang tidak kunjung terselesaikan sekaligus menjadi citra buruk pemerintah.

B. METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian dilakukan di Kampung Pengamen, Dukuh Kalisari, Desa Banyudono, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan metode penelitian studi kasus. Unit analisis dalam penelitian ini yaitu rumah tangga di Dukuh Kalisari. Peta lokasi penelitian disajikan dalam Gambar 1.



Gambar 1. Peta Administrasi Dukuh Kalisari

Dalam penelitian ini, analisis yang digunakan yaitu analisis kualitatif. Berdasarkan tujuan penelitian, peneliti bermaksud untuk menganalisis:

1. Perkembangan Permukiman Kumuh Liar di Dukuh Kalisari

Menurut (M. Rindarjono, 2017) proses pemadatan terdapat 2 tahapan yaitu tahapan pemadatan didalam bangunan yaitu berupa penambahan sekat ruang yang diakibatkan dari bertambahnya anggota keluarga yang tinggal dalam rumah tersebut. Sekat-sekat yang digunakan untuk memberi batas antar ruang tersebut biasanya terbuat dari material sederhana atau seadanya dapat berupa kain ataupun korden. Proses selanjutnya yaitu pemadatan diluar bangunan tempat tinggal, hal ini dapat terjadi apabila rumah tersebut sudah tidak dapat menampung anggota keluarga dan masih terdapat lahan untuk melakukan penambahan ruang diluar bangunan utama. Dari uraian sebelumnya maka perkembangan permukiman kumuh dapat dilihat prosesnya melalui perkembangan jumlah penghuni rumah dan jumlah ruangan rumah. Jenis perkembangan jumlah ruang dapat terjadi melalui 2 proses yaitu proses infasi ruang dan konsolidasi ruang. Untuk mengetahui

proses perkembangannya, dilakukan wawancara kepada masyarakat Dukuh Kalisari. Selanjutnya perubahan yang terjadi dipetakan melalui peta perubahan jumlah ruang tahun 2012-2017, peta perubahan jumlah ruangan tahun 2017-2022, peta perubahan jumlah penghuni rumah tahun 2012-2017, dan peta perubahan jumlah penghuni rumah tahun 2017-2022.

2. Tingkat Kekumuhan di Dukuh Kalisari

Tingkat kekumuhan dianalisis menggunakan metode 3x3x3 untuk mengetahui wilayah yang memiliki pengaruh terbanyak dari keseluruhan wilayah. Wilayah penelitian yang terletak di Dukuh Kalisari dibagi menjadi 2 area yaitu area yang berbatasan langsung dengan sungai merupakan area 1 dan area yang berada di utara jalan lokal merupakan area 2. Pembagian area ini digunakan untuk memudahkan analisis penyebab kekumuhan yang terdiri dari 3 komponen yaitu perumahan, kemiskinan, dan infrastruktur dengan parameter setiap komponen diuraikan pada Tabel 3.1:

Tabel 2.1. Parameter Penilaian Tingkat Kekumuhan

Indikator	Komponen Penilaian	Bobot
Perumahan	Berbatasan dengan Sungai	6
	Semi Permanen	2
	Status Tanah Illegal	2
kemiskinan	Pengangguran	10
	Air	4
Infrastruktur	Toilet	2
	Jalan	1
	Limbah	1,5
	Sampah	1,5

Sumber: Singh et al., 2013

Wilayah penelitian yang telah dibagi menjadi 2 area dilakukan penilaian dengan mendistribusikan kedalam matriks 3x3x3 dengan menggunakan data tingkat kemiskinan, perumahan, dan kondisi infrastruktur. Matriks 3x3x3 dikembangkan berdasarkan 9 parameter yang terbagi dalam tiga komponen. Masing-masing parameter dibagi menjadi lima bagian dengan mengambil selisih nilai minimum dan maksimum dari setiap parameter dan mendistribusikan kedalam lima rentang. Skor diberikan dengan rentang maksimum yaitu skor 5 (lima) dan minimum diberi skor 1 (satu).

Setelah dilakukan skoring pada setiap unit analisis, dilakukan pemeringkatan pada setiap komponen yaitu peringkat 1/2/3. Parameter yang mendapatkan skor terbanyak dianggap sebagai penyebab utama kekumuhan. Penilaian tersebut menunjukkan

kategorisasi permukiman kumuh berdasarkan tingkat kondisinya. Tingkat kekumuhan terburuk ditentukan dari hasil pemeringkatan yang menunjukkan 3x3x3 yang artinya kondisi kemiskinan, perumahan, dan infrastruktur berada dikondisi dengan jumlah yang banyak. Matriks 3x3x3 permukiman kumuh disajikan dalam tabel 3.2:

Tabel 2.2. Matriks Permukiman Kumuh

Tabel Matriks 3x3x3 Perumahan/Kemiskinan/Infrastruktur		
1/1/1	1/1/2	1/1/3
1/2/1	1/2/2	1/2/3
1/3/1	1/3/2	1/3/3
2/1/1	2/1/2	2/1/3
2/2/1	2/2/2	2/2/3
2/3/1	2/3/2	2/3/3
3/1/1	3/1/2	3/1/3
3/2/1	3/2/2	3/2/3
3/3/1	3/3/2	3/3/3

Sumber: Singh et al., 2013

3. Strategi Penanganan Permukiman Kumuh Liar

Strategi penanganan dilihat dari indikator kekumuhan yang telah dinilai dalam matriks 3x3x3 yang memiliki skor tertinggi. Penanganan dilakukan dengan memperhatikan wilayah area yang paling berpengaruh dengan indikator yang memiliki faktor kekumuhan tertinggi. Sehingga akan dirumuskan penanganan yang tepat sesuai dengan fenomena yang terjadi di lapangan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perkembangan Permukiman Kumuh Liar

Pada tahun 2017 terdapat beberapa masyarakat yang menambah jumlah ruang dengan rata-rata jumlah ruang pada tahun tersebut yaitu berjumlah 2-3 ruang. Pada tahun 2022 tidak terdapat perubahan yang spesifik dari tahun 2017 dikarenakan luas rumah sudah tidak memungkinkan untuk dilakukan penambahan ruangan. Hingga tahun 2023 masyarakat menyampaikan bahwa penambahan ruang di dalam rumah sudah dilakukan secara maksimal dalam memanfaatkan ruangan yang ada.

Perkembangan penambahan ruang yang terjadi di Dukuh Kalisari hingga tahun 2022 menunjukkan bahwa perkembangan yang terjadi merupakan sebuah konsolidasi

ruang. Konsolidasi ruang merupakan penambahan jumlah ruangan rumah yang terjadi di dalam rumah karena penambahan jumlah anggota keluarga sehingga dibutuhkan ruang yang lebih banyak. Permukiman kumuh liar di Dukuh Kalisari tidak mencapai proses invasi ruang karena tidak memungkinkan adanya penambahan ruang di luar rumah yang disebabkan oleh keterbatasan lahan yang tersedia.

2. Tingkat Kekumuhan

Penilaian kekumuhan di Dukuh Kalisari menggunakan matriks 3x3x3 dengan mendistribusikan wilayah penelitian kedalam parameter yang menilai kondisi perumahan, kemiskinan, serta kondisi infrastruktur. Berikut ini penilaian permukiman dari setiap parameter tersaji dalam lampiran 2. Sistem pemeringkatan dikategorikan dengan perolehan skor yang tersaji dalam tabel 3.1:

Tabel 3.1. Pemeringkatan Nilai Akhir Tingkat Kekumuhan

No	Kondisi Parameter	Peringkat
1.	0-10	1
2.	11-21	2
3.	>22	3

Sumber: Singh et al., 2013

Pemeringkatan penilaian tingkat kekumuhan berdasarkan parameter:

a. Penilaian Kondisi Perumahan

Parameter dalam komponen ini meliputi jumlah rumah yang bersinggungan langsung dengan sungai, jumlah rumah yang memiliki konstruksi semi permanen, dan rumah yang tidak memiliki status legalitas kepemilikan lahan. Berikut pemeringkatan penilaian kekumuhan berdasarkan kondisi perumahan tersaji dalam tabel 3.2:

Tabel 3.2. Penilaian Skor Kekumuhan Berdasarkan Kondisi Perumahan

Parameter	Bobot	Kisaran Skor Kekurangan				
Jumlah rumah yang bersinggungan dengan sungai	6	0-6	7-13	14-20	21-17	28-33
Rumah semi permanen	2	0-6	7-13	14-20	21-17	28-33
Legalitas	2	0-6	7-13	14-20	21-17	28-33
Nilai skor kekurangan		1	2	3	4	5

Sumber: Hasil Penelitian Penulis, 2023

Tabel 3.3. Pemingkatan Penilaian Kekumuhan Berdasarkan Kondisi Perumahan

Nilai		Total Nilai	
Area A	Area B	Area A	Area B
1	3	6	18
1	1	2	2
3	3	6	6
Jumlah		14	26
Peringkat		2	3

Sumber: Hasil Penelitian Penulis, 2023

b. Penilaian Kondisi Kemiskinan

Parameter dalam komponen ini meliputi jumlah pengangguran sebagai bobot prioritas. Parameter diberi skor dengan cara yang sama kemudian diberi skor akhir atau pemingkatan dari 1 hingga 3. Berikut penilaian kondisi kemiskinan tersaji dalam tabel 3.4:

Tabel 3.4. Penilaian Skor Kekumuhan Berdasarkan Kondisi Kemiskinan

Parameter	Bobot	Kisaran Skor Kekurangan				
Jumlah Pengangguran	10	0-6	7-13	14-20	21-17	28-33
Nilai skor kekurangan		1	2	3	4	5

Sumber: Hasil Penelitian Penulis, 2023

Tabel 3.5. Pemingkatan Penilaian Kekumuhan Berdasarkan Kondisi Kemiskinan

Nilai		Total Nilai	
Area A	Area B	Area A	Area B
1	1	10	10
Jumlah		10	10
Peringkat		1	1

Sumber: Hasil Penelitian Penulis, 2023

c. Penilaian Kondisi Infrastruktur

Kekurangan infrastruktu di setiap kawasan kumuh dihitung berdasarkan parameter yang diperoleh dari survey fisik. Berikut penilaian kondisi infrastruktur tersaji dalam tabel 3.6

Tabel 3.6. Penilaian Skor Kekumuhan Berdasarkan Kondisi Infrastruktur

Parameter	Bobot	Kisaran Skor Kekurangan				
Kekurangan saluran air bersih	4	0-6	7-13	14-20	21-17	28-33
Kekurangan toilet dalam rumah	2	0-6	7-13	14-20	21-17	28-33
aksesibilitas jalan	1	0-6	7-13	14-20	21-17	28-33
Kekurangan saluran limbah	1,5	0-6	7-13	14-20	21-17	28-33

Parameter	Bobot	Kisaran Skor Kekurangan				
Tidak terdapat fasilitas pengolahan sampah	1,5	0-6	7-13	14-20	21-17	28-33
Nilai skor kekurangan		1	2	3	4	5

Sumber: Hasil Penelitian Penulis, 2023

Tabel 3.7. Pemingkatan Penilaian Kekumuhan Berdasarkan Kondisi Kemiskinan

Nilai		Total Nilai	
Area A	Area B	Area A	Area B
3	3	12	12
3	3	6	6
1	1	1	1
3	3	4,5	4,5
3	3	4,5	4,5
Jumlah		28	28
Peringkat		3	3

Sumber: Hasil Penelitian Penulis, 2023

d. Pengembangan Matriks 3x3x3

Dari metode penilaian yang telah dilakukan diatas, dari 2 area permukiman kumuh yang berjumlah 33 rumah diberi peringkat (elemen dari matriks 3x3x3) untuk setiap parameternya yaitu perumahan, kemiskinan, dan infrastruktur. Hasil kekumuhan dari area A menunjukkan peringkat 2/1/3 dan area B yaitu 3/1/3. Pada area A nilai akhir tersebut 2/1/3 yang menunjukkan bahwa dalam hal perumahan mendapatkan peringkat 2, dalam hal kemiskinan dengan peringkat 1 yang artinya bukan merupakan faktor yang sangat mempengaruhi kekumuhan di wilayah tersebut, dan untuk infrastruktur mendapatkan peringkat 3 yang artinya masih banyak kekurangan infrastruktur.

Hasil kekumuhan pada area B menunjukkan nilai 3/1/3 yang artinya memiliki nilai buruk dalam hal perumahan dibandingkan dengan area A, faktor kemiskinan mendapatkan nilai 1 yang berarti kemiskinan bukan menjadi persoalan utama pada area A, dan mendapatkan nilai 3 pada infrastruktur yang artinya masih banyak kekurangan dalam hal infrastruktur. Untuk mengetahui tingkat kekumuhan antara area A dan B, pemeringkatan dicocokkan dengan matriks akhir yang disajikan pada tabel 4.9 tabel tersebut digunakan untuk mengetahui permukiman mana yang memiliki kondisi terburuk. Permukiman yang memiliki kekumuhan terburuk yaitu yang mendapatkan peringkat 3/3/3, semakin mendekati 3/3/3 maka permukiman tersebut semakin buruk dan harus segera ditindak lanjuti. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa permukiman kumuh area B memiliki

kekumuhan yang lebih buruk dibandingkan dengan area A. Kekumuhan tersebut disebabkan utamanya karena faktor kondisi rumah dan kurangnya infrastruktur.

Tabel 3.8. Matriks Permukiman Kumuh

Tabel Matriks 3x3x3 Perumahan/Kemiskinan/Infrastruktur		
1/1/1	1/1/2	1/1/3
1/2/1	1/2/2	1/2/3
1/3/1	1/3/2	1/3/3
2/1/1	2/1/2	2/1/3
2/2/1	2/2/2	2/2/3
2/3/1	2/3/2	2/3/3
3/1/1	3/1/2	3/1/3
3/2/1	3/2/2	3/2/3
3/3/1	3/3/2	3/3/3

Sumber: Singh et al., 2013

3. Strategi Penanganan

a. Penanganan permukiman kumuh di area A

Strategi penanganan permukiman kumuh liar dilakukan dengan mengetahui penyebab utama kekumuhan pada wilayah tersebut. Kekumuhan di permukiman area A penyebab utamanya yaitu kurangnya infrastruktur dalam permukiman tersebut. Infrastruktur yang memiliki nilai terburuk yaitu kondisi persampahan serta pengelolaan air limbah. Pada permukiman kumuh liar area A tidak terdapat system persampahan yang diolah sesuai dengan standar teknis. Hal ini dapat diperbaiki dengan pengadaan fasilitas persampahan dan edukasi terhadap masyarakat mengenai pengolahan sampah. Selain itu, kondisi system limbah yang buruk karena limbah rumah tangga dialirkan langsung ke sungai. System perlimbahan berupa *sapting tank* sudah tersedia di permukiman ini, namun posisinya saluran limbah tersebut tidak sesuai dengan standar kesehatan karena posisinya yang tidak sampai 1 meter dengan permukiman dan bersebelahan dengan sungai sehingga dapat mencemari air di lingkungan sekitar.

b. Penanganan permukiman kumuh di area B

Permasalahan utama yang menjadi penyebab kekumuhan di kawasan permukiman kumuh liar area B yaitu kondisi perumahan dan kurangnya infrastruktur permukiman yang memadai. Masalah perumahan yang paling menjadi pokok utama yaitu posisi rumah yang bersinggungan dengan sungai. Posisi permukiman area B merupakan sempadan sungai yang jika diukur dari bibir sungai, permukiman area A juga masih termasuk sempadan sungai sehinggakedua area tersebut sejatinya menyalahi peraturan sempadan sungai. Penanganan yang dapat dilakukan dari permasalahan tersebut yaitu dengan melakukan pemugaran dengan tetap memperhatikan hak masyarakat yaitu

hak dalam memiliki tempat tinggal. Pemerintah harus menyediakan tempat tinggal baru yang layak bagi masyarakat Dukuh Kalisari. Hal tersebut dapat dilakukan dengan dibangunnya rumah susun

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang disampaikan peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perkembangan permukiman kumuh liar di Dukuh Kalisari berkembang secara internal, yang artinya perkembangan terjadi di dalam rumah berupa pemadatan jumlah penghuni dan penambahan jumlah ruangan rumah. Perkembangan permukiman kumuh liar di Dukuh Kalisari terjadi akibat adanya faktor kelahiran, perkembangan ini tidak disebabkan oleh faktor migrasi karena adanya pendatang hanya tinggal untuk sementara atau sewa.
2. Penilaian tingkat kekumuhan dan legalitas di Dukuh Kalisari menunjukkan hasil yaitu permukiman area B memiliki kekumuhan yang lebih buruk dibandingkan dengan permukiman area A. dari kedua area, sebab kekumuhan utamanya yaitu karena kurangnya infrastruktur yang memadai dan legalitas lahannya. Status legalitas permukiman di Dukuh Kalisari yaitu illegal yang disebabkan oleh status hak kepemilikan bukan hak milik pribadi namun merupakan tanah kas desa dan menyalahi aturan peruntukan lahan dimana seharusnya lahan tersebut diperuntukkan sebagai sempadan sungai.
3. Penanganan paling efektif yang dapat dilakukan di permukiman kumuh liar Dukuh Kalisari yaitu dengan melakukan pemugaran permukiman sehingga lahan dapat difungsikan kembali sebagai sempadan sungai. Dengan demikian pemerintah berperan dengan melanjutkan rencana penanganan yang telah direncanakan sebelumnya dengan membangun rumah susun bagi masyarakat Dukuh Kalisari.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Crysta, E. A. (2017). Analisis Tingkat Kekumuhan dan Pola Penangannya (Studi Kasus: Kelurahan Keputih, Surabaya). In *Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Sepuluh Nopember*.
- Fitri, D. (2021). Faktor-Faktor Penyebab Munculnya Permukiman Kumuh Daerah Perkotaan Di Indonesia (Sebuah Studi Literatur). *Journal Unesa*, 1–9. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/swara-bhumi/article/view/38202/33713>

- Maulana, Z. (2018). ANALISIS PERKEMBANGAN PERMUKIMAN KAITANNYA DENGAN KONDISI SOSIAL KEMASYARAKATAN DI KECAMATAN MENGANTI KABUPATEN GRESIK(Studi Kasus Tentang Perubahan Kondisi Sosial Kemasyarakatan di Kecamatan Menganti). *Swara Bhumi*, 05, 1–7.
- Putri, K., Ridlo, M. A., & Widyasamratri, H. (2023). Studi Literatur: Strategi Penanganan Permukiman Kumuh di Perkotaan. *Jurnal Kajian Ruang*, 3(1), 104. <https://doi.org/10.30659/jkr.v3i1.22909>
- Rindarjono, Moh. Gamal. 2017. “SLUM” Kajian Permukiman Kumuh dalam Prespektif Spasial. Media Pustaka. Yogyakarta.
- Singh, P. O., Dhote, K. K., & Soni, N. (2013). *Development of typologies of slum settlements: the case of a million plus city of India*. 179, 153–164. <https://doi.org/10.2495/SC130131>